

Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022–2024

Widya Sinaga¹ Ignasyia Nancy Hutabarat² Tiara Tabitha Sianturi³ Selsi Lubis⁴ Putri Kemala Sari Dewi Lubis⁵ Nela Permata Sari Lubis⁶

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: widyasinaga2007@gmail.com¹ ignasyianancy@gmail.com² tiaratabitha2@gmail.com³ selsilubis925@gmail.com⁴ putrikemala@unimed.ac.id⁵ nelapslubis@unimed.ac.id⁶

Abstract

This study aims to analyze the performance of regional budget management based on the Regional Government Financial Statements (LKPD) of Tangerang Regency for the period 2022–2024. The research employs a quantitative approach using secondary data obtained from official financial reports published by the Tangerang Regency Government. The data analyzed include the budget and realization of regional revenue, locally generated revenue (PAD), as well as the budget and realization of regional expenditure as presented in the Budget Realization Report (LRA). The analytical technique used is descriptive analysis with a budget variance approach to assess the effectiveness and efficiency of regional financial management. The results indicate that the financial performance of the Tangerang Regency Government during the 2022–2024 period shows a positive trend. The realization of regional revenue in each year exceeds the established budget targets, indicating effectiveness in managing revenue sources. Locally generated revenue (PAD) also increases annually, reflecting the government's efforts to optimize regional revenue potential. Meanwhile, the realization of regional expenditure remains below the planned budget, indicating efficiency in budget utilization. These findings suggest that the management of the regional budget (APBD) in Tangerang Regency has been carried out effectively and efficiently. Therefore, the local government is expected to continue optimizing locally generated revenue and to evaluate the structure of regional expenditure in order to enhance the contribution of financial management to regional development and public service improvement.

Keywords: Regional Budget (APBD); Regional Financial Performance; LKPD; Locally Generated Revenue (PAD); Expenditure Efficiency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang selama periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Data yang dianalisis meliputi anggaran dan realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), serta anggaran dan realisasi belanja daerah yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan varians anggaran untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang selama periode 2022–2024 menunjukkan tren yang positif. Realisasi pendapatan daerah pada setiap tahun mampu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan, yang menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di bawah anggaran yang direncanakan, yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan secara cukup efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah serta melakukan evaluasi terhadap struktur belanja daerah agar

pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Kata Kunci: APBD; Kinerja Keuangan Daerah; LKPD; Pendapatan Asli Daerah; Efisiensi Belanja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Edtiyarsih, 2023). APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan berbagai program pembangunan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam system yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan dalam efektivitas pengelolaan APBD (Azhari, L., & Sasongko, R. W, 2025).

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan yang cukup pesat. Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang besar, Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan APBD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dan mengelola belanja daerah secara efisien. Keterbatasan dalam optimalisasi PAD serta pola alokasi belanja yang belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan produktif dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan dan belanja yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan APBD yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik atau pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik (Magdalena Y. Devinci, 2022). Dalam konteks ini, analisis terhadap realisasi APBD menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan serta mengendalikan belanja daerah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai indikator analisis kinerja keuangan daerah seperti varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, varians belanja, serta rasio efisiensi belanja.

Penelitian mengenai kinerja anggaran pemerintah daerah menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh Karena itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah seharusnya mulai untuk mengupayakan untuk mencari cara memaksimalkan potensi kemandirian daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD (Laras et al., 2008), Karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor periode 2019–2023 yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD berada pada kategori sangat baik, meskipun tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori sedang karena ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan PAD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah juga menjadi faktor penting dalam menilai kinerja APBD. Belanja daerah yang tidak teralokasi secara optimal dapat mengurangi efektivitas anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. Riantisari et al., (2025) menunjukkan bahwa dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal dapat menurunkan rasio aktivitas meskipun efektivitas pendapatan daerah tergolong tinggi. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian internasional yang menunjukkan bahwa proporsi belanja rutin yang lebih besar dibandingkan belanja modal dapat mengurangi efektivitas anggaran dalam mendukung pembangunan jangka panjang (Upadhyaya, 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola struktur belanja secara seimbang agar anggaran yang dimiliki dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.

Dalam kerangka evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis terhadap target dan realisasi anggaran menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. (Darma et al., 2024) menekankan pentingnya analisis deskriptif komparatif melalui perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran secara tepat. Selain itu, penelitian Delang & Sitorus (2024) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. Penelitian lain yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia memiliki tingkat efektivitas yang relatif baik dalam mencapai target pendapatan daerah (Ismiyana et al., 2025). Meskipun berbagai penelitian telah membahas kinerja keuangan pemerintah daerah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan, khususnya dalam konteks Kabupaten Tangerang. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek efektivitas pendapatan daerah atau efisiensi belanja secara terpisah. Padahal, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja APBD, diperlukan analisis yang mencakup berbagai indikator keuangan secara simultan, seperti varians pendapatan, varians belanja, rasio derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, serta rasio efisiensi belanja. Analisis yang lebih menyeluruh terhadap indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas fiskal daerah serta efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Dari sisi teoretis, kajian mengenai kinerja APBD sering kali hanya berfokus pada tingkat pencapaian target pendapatan atau realisasi belanja tanpa mempertimbangkan dimensi evaluatif yang lebih luas. Misalnya, realisasi pendapatan yang tinggi sering dianggap sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, namun hal tersebut belum tentu

mencerminkan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah maupun efisiensi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif untuk menilai kinerja pengelolaan APBD secara lebih objektif dan menyeluruh. Penelitian ini memiliki keunikan karena menggunakan pendekatan analisis yang lebih terintegrasi dalam mengevaluasi kinerja realisasi APBD Kabupaten Tangerang. Penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas pendapatan daerah, tetapi juga mengkaji secara simultan varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, varians belanja, serta rasio efisiensi belanja. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang selama periode 2022–2024 melalui berbagai indikator analisis keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tangerang serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 24, “Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.” Sedangkan menurut Dedi Nordiawan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat dan daerah), dalam satu periode pelaporan. Dalam konteks otonomi daerah, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan serta mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Aithan et al., 2025). Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Provinsi Banten memiliki potensi fiskal yang relatif besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan APBD juga mengalami transformasi menuju sistem yang lebih transparan dan terintegrasi melalui digitalisasi keuangan daerah. Andhayani (2020) menyatakan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan anggaran daerah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan sistem berbasis teknologi seperti e-budgeting memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran menjadi lebih efisien dan mudah diawasi. Namun, manfaat utama dari penerapan e-budgeting tidak hanya terkait dengan peningkatan efisiensi proses penganggaran, tetapi juga pada keterbukaan informasi anggaran kepada Masyarakat (Lathifah et al., 2024). Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan APBD dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus mempercepat proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Tangerang, penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih

transparan dan akuntabel menjadi sangat penting mengingat besarnya volume anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan serta mengelola belanja secara efisien (Wijaya, A. A., 2025).

Kinerja Realisasi Anggaran

Kinerja realisasi anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD (Marchelino et al., 2013). Kinerja ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan serta mengendalikan belanja daerah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kinerja realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat pencapaian target pendapatan atau belanja, tetapi juga dari kualitas pengelolaan anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi kebijakan fiskal daerah (Merlyn Pattimahu et al., n.d.). Dalam praktiknya, kinerja realisasi anggaran sering diukur melalui perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai selama satu periode anggaran. Marlina dan Akbar (2023) menyatakan bahwa evaluasi realisasi anggaran penting dilakukan untuk menilai apakah pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung program pembangunan yang telah direncanakan. Evaluasi tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.

Bagi Kabupaten Tangerang, evaluasi terhadap kinerja realisasi anggaran menjadi sangat penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola serta kompleksitas program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, realisasi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik apabila komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja yang bersifat produktif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola komposisi belanja daerah secara seimbang. Syukri et al. (2022) menemukan bahwa meskipun beberapa daerah mampu mencapai target realisasi anggaran yang tinggi, sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja operasional sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja realisasi anggaran perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai indikator keuangan daerah.

Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja (Rasio)

Analisis kinerja pendapatan dan belanja merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui perbandingan antara target anggaran dan realisasi yang dicapai. Pendekatan rasio keuangan sering digunakan dalam analisis APBD karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kinerja fiskal pemerintah daerah. Menurut Jundia dan Sarwono (2023), penggunaan rasio keuangan dalam analisis APBD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dalam mencapai target pendapatan serta mengendalikan belanja daerah secara lebih akurat. Rasio keuangan daerah pada dasarnya mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Marlina dan

Akbar (2023) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan daerah tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian anggaran, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan rasio, pemerintah daerah dapat menilai apakah pengeluaran yang dilakukan telah memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Tangerang, analisis rasio keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan serta belanja daerah secara efektif. Dengan jumlah pendapatan daerah yang cukup besar, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran secara proporsional antara belanja operasional dan belanja modal. Keseimbangan antara kedua jenis belanja tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan rasio keuangan dalam analisis APBD mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Tobing et al. (2023) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan serta merumuskan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif di masa mendatang.

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurut Yakub et al. (2022), efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat baik apabila realisasi penerimaan pajak mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pajak yang dimiliki serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat efektivitas pajak daerah juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sistem administrasi perpajakan secara efektif. Dalam konteks Kabupaten Tangerang, pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai sektor seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, serta pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak daerah tetap bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sistem administrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi pajak yang dimiliki oleh suatu daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola fiskal serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Hariyanto et al. (2022) menemukan bahwa keberhasilan pemungutan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi perpajakan serta ketersediaan basis data wajib pajak yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif yang didukung oleh analisis kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja realisasi anggaran berdasarkan data keuangan daerah yang tersedia secara resmi. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara objektif berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan periode penelitian selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2022 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, khususnya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang yang dipublikasikan secara resmi setiap tahun anggaran. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bagian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memuat informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang. Dokumen yang digunakan meliputi laporan keuangan daerah, laporan realisasi anggaran, serta publikasi resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD selama periode penelitian.

Teknik dokumentasi ini dipilih karena data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa data keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yang berkaitan dengan anggaran dan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), target dan realisasi pajak daerah, serta anggaran dan realisasi belanja daerah selama periode 2022 hingga 2024. Sementara itu, data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD di Kabupaten Tangerang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui beberapa indikator rasio keuangan daerah yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pajak daerah, analisis varians anggaran belanja, serta rasio efisiensi belanja. Analisis varians pendapatan digunakan untuk mengetahui perbedaan antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Rasio efektivitas pajak daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Sementara itu, analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja. Proses analisis data dilakukan secara sistematis yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, perhitungan indikator rasio keuangan daerah, hingga interpretasi hasil analisis. Tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Tangerang selama periode penelitian. Dengan metode analisis yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang objektif serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendekatan penelitian ini juga memungkinkan penelitian untuk direplikasi oleh peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa pada daerah yang berbeda, karena prosedur pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dijelaskan secara sistematis dan transparan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Realisasi APBD Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Banten. Kondisi tersebut memberikan potensi besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam periode tahun 2022 sampai dengan 2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik melalui optimalisasi penerimaan daerah maupun pengelolaan belanja yang lebih efisien. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator analisis kinerja keuangan daerah, yaitu analisis varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pajak daerah, analisis varians anggaran belanja, serta rasio efisiensi belanja. Analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.

Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan digunakan untuk mengetahui selisih antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah. Varians ini memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah direncanakan dalam APBD.

Tabel 1. Varians Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Keterangan	Jumlah (Rp)
Anggaran	6.415.749.114.721
Realisasi	6.818.758.206.108
Varians	403.009.091.387
Presentase Realisasi	106,28%

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan Kabupaten Tangerang mencapai Rp 6,82 triliun, melampaui target anggaran sebesar Rp 6,41 triliun. Selisih antara realisasi dan anggaran menghasilkan varians positif sebesar Rp 403,01 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 106,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia sehingga realisasi pendapatan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Varians Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Keterangan	Jumlah (Rp)
Anggaran	7.400.772.074.384
Realisasi	7.981.005.385.558
Varians	580.233.311.174
Presentase Realisasi	107,84%

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan mencapai Rp 7,98 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7,40 triliun. Dengan demikian terdapat varians positif sebesar Rp 580,23 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 107,84%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. Varians Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Anggaran	8.095.895.304.157
Realisasi	8.505.910.087.435

Varians	410.014.783.278
Presentase Realisasi	105,06%

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 8,51 triliun dari target anggaran sebesar Rp 8,10 triliun. Selisih tersebut menghasilkan varians positif sebesar Rp 410,01 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 105,06%. Meskipun persentase realisasi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan kinerja pendapatan yang sangat baik.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah. Perhitungan rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut (Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah x 100%):

2022:

$$\frac{3.665.710.323.870}{6.818.758.206.108} \times 100\% = 53,76\%$$

2023:

$$\frac{4.402.192.318.342}{7.981.005.385.558} \times 100\% = 55,14\%$$

2024:

$$\frac{4.616.874.819.974}{8.505.910.087.435} \times 100\% = 54,28\%$$

Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah. Perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut (Realisasi Pajak Daerah / Target Pajak Daerah x 100%):

2022:

$$\frac{2.886.076.753.678}{2.886.076.753.678} \times 100\% = 100\%$$

2023:

$$\frac{3.490.363.924.921}{3.121.400.000.000} \times 100\% = 111,82\%$$

2024:

$$\frac{3.615.835.888.430}{3.356.450.000.000} \times 100\% = 107,73\%$$

Analisis Varians Anggaran Belanja

Analisis varians belanja dilakukan untuk mengetahui selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang terjadi.

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varians (Rp)
2022	6.415.749.114.721	6.149.143.629.405	-266.605.485.316
2023	7.498.234.131.488	7.070.603.058.354	-427.631.073.134
2024	8.221.135.285.363	7.845.174.721.433	-375.960.563.930

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Perhitungan rasio efisiensi belanja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut (Realisasi Anggaran / Total Anggaran x 100%):

2022:

$$\frac{6.149.143.629.405}{6.415.749.114.721} \times 100\% = 95,84\%$$

2023:

$$\frac{7.070.603.058.354}{7.498.234.131.488} \times 100\% = 94,30\%$$

2024:

$$\frac{7.845.174.721.433}{8.221.135.285.363} \times 100\% = 95,43\%$$

Pembahasan

Analisis Varians Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 realisasi pendapatan Kabupaten Tangerang selalu melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan mencapai Rp 6,82 triliun atau 106,28% dari target anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp 7,98 triliun atau 107,84% dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu pada tahun 2024 realisasi pendapatan mencapai Rp 8,51 triliun atau 105,06% dari target anggaran. Walaupun persentase realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah berada dalam kategori sangat baik.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tangerang selama periode penelitian berada pada kisaran di atas 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tergolong tinggi. Pada tahun 2022 rasio derajat desentralisasi mencapai 53,76%, yang berarti lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023 rasio ini meningkat menjadi 55,14%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD. Namun pada tahun 2024 rasio tersebut sedikit menurun menjadi 54,28%. Meskipun demikian, nilai rasio ini masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan banyak daerah lainnya di Indonesia.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Hasil perhitungan rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah Kabupaten Tangerang selama periode penelitian berada dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas pajak daerah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 efektivitas pajak daerah meningkat secara signifikan menjadi 111,82%, yang berarti realisasi pajak daerah jauh melampaui target yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 efektivitas pajak daerah tercatat sebesar 107,73%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kinerja pemungutan pajak daerah yang optimal.

Analisis Varians Anggaran Belanja

Selama periode penelitian, realisasi belanja Kabupaten Tangerang selalu lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menghasilkan varians negatif pada setiap tahun anggaran. Pada tahun 2022 terdapat selisih sebesar Rp 266,61 miliar antara anggaran dan realisasi belanja. Pada tahun 2023 varians meningkat menjadi Rp 427,63 miliar, yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Namun pada tahun 2024 varians belanja menurun menjadi Rp 375,96 miliar, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran daerah.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja Kabupaten Tangerang selama periode 2022–2024 berada pada kisaran 94% hingga 96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah tergolong efisien karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 rasio efisiensi belanja tercatat sebesar 95,84%, kemudian menurun menjadi 94,30% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 95,43%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara cukup efisien dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tren yang positif. Realisasi pendapatan daerah selama periode penelitian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebagian besar mampu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan PAD tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah secara lebih optimal, terutama melalui pengelolaan pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Selain itu, realisasi belanja daerah yang berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dapat dikategorikan cukup efektif dan efisien. Hal ini juga diperkuat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat terus meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah serta melakukan evaluasi terhadap struktur belanja agar pengelolaan APBD dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aithan, A. Frinaldi, & N. E. Putri. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan APBD tahun 2024. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 9(2).
- Azhari, & R. W. Sasongko. (2025). Efektivitas sistem administrasi pemerintahan daerah terhadap kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2, 116–129.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Daling, M. (2013). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Halim, A. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, R., & Abdullah, S. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–56.
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 18–34.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, D. W. (2022). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja APBD pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 9(1), 23–34.
- Pattimahu, A. M., & Tangke, D. M. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah ditinjau dari efisiensi dan pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2022–2024. *Journal of Applied Accounting*, 4(2), 102–107.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022*. Tangerang.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023*. Tangerang.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024*. Tangerang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratama, A. N., & Putri, D. K. (2020). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 85–96.
- Sari, F., & Yuliana, R. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 77–88.
- Siregar, B. (2018). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah berbasis LKPD dalam menilai kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(1), 1–12.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Wijaya, A. A. (2025). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2021–2023.